



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUB UNIT KERJA : BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUDARMAN**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI**
3. NHK : **218036**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 215.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/76 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 592.250.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2013, WARISAN Rp.
201.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 7.600.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 11.200.000
4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, WARISAN
Rp. 9.650.000
5. MOBIL, MITSUBISHI COLT PICK UP Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 75.000.000
6. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2013, WARISAN Rp.
199.000.000
7. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 5.600.000
8. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 9.600.000
9. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 8.100.000
10. MOBIL, MITSUBISHI COLT PICK UP Tahun 2013, HASIL SENDIRI



Rp. 65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 47.650.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 40.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 894.900.000

III. HUTANG

Rp. 69.888.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 825.012.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **16 Agustus 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.